



## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMKM PADA MASA COVID-19 DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

**Rezky Fadhilah<sup>1)</sup>, Lukman Munawar Fauzi<sup>2)</sup>, Toto Kushartono<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Di latarbelakangi dengan adanya fenomena masalah pada sektor UMKM yang mengalami dampak penurunan ekonomi akibat pandemi virus Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengupayakan pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 melalui pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dengan analisis data melalui merangkum data yang didapatkan, menyusun data yang diperoleh, menyajikan data serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi berdasarkan Pemerintah sebagai Regulator, kebijakan yang dibuat belum merata dan maksimal serta program yang dibuat dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 adalah pendataan dan pemberdayaan. Pemerintah sebagai Dinamisator, bimbingan untuk mendorong partisipasi pelaku UMKM adalah mempermudah penerbitan dan melakukan pendataan serta pengarahan dalam proses pemberdayaan adalah pendataan, dokumentasi dan legalitas produk. Dan Pemerintah sebagai Fasilitator, penyediaan sarana dan prasarana adalah membentuk koperasi dengan legalitas hukum, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, pemberian modal dan pemberian alat. Kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dalam pemberdayaan UMKM memiliki keterbatasan dan kurang memadai.

**Kata Kunci:** Peran, Pemberdayaan UMKM, Covid-19

### Abstract

*The background is the problem phenomenon in the UMKM sector which is experiencing the impact of the economic decline due to the Covid-19 virus pandemic. The aim of this research is to find out, analyze and describe the role of the Regional Government in seeking economic recovery during*

*the Covid-19 era through empowering UMKM in Tebo Regency, Jambi Province. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation, literature study with data analysis by summarizing the data obtained, compiling the data obtained, presenting the data and drawing conclusions. From the research results, it can be concluded that the role of the Regional Government in efforts to empower UMKM during the Covid-19 period in Tebo Regency, Jambi Province is based on the Government as Regulator, the policies made have not been evenly distributed and optimal and the programs created to empower UMKM during the Covid-19 period are data collection and empowerment. The government as a dynamist, guidance to encourage the participation of UMKM actors is to facilitate publishing and collecting data and directing the empowerment process in terms of data collection, documentation and product legality. And the Government as a Facilitator, provides facilities and infrastructure by forming cooperatives with legal legality, empowering UMKM through training, providing capital and providing tools. The capacity of human resources and budget in empowering UMKM is limited and inadequate.*

**Keywords:** Role, Empowerment of UMKM, Covid-19

## **PENDAHULUAN**

Pemberdayaan UMKM diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka dari itu Pemerintah Daerah harus memerhatikan UMKM di daerahnya masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan Undang-undang yang sudah diatur dan disepakati. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan UMKM di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Semua juga sepakat jika UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran. Tentu, pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini memiliki peran sebagai sarana yang dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat. UMKM juga memiliki juga memiliki peranan yang penting

dalam meratakan perekonomian bangsa Indonesia, terutama masyarakat kecil. Namun saat ini Indonesia sedang mengalami masalah global yang dapat mempengaruhi kondisi sektor perekonomian. Pengaruh yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai lapisan masyarakat pedesaan. Permasalahan global tersebut ialah pandemi covid-19 yang hingga saat ini masih menjadi perhatian pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satu penanggulangan yang perlu dilakukan ialah pada sektor perekonomian. Tujuan dari dibuatnya Peraturan Daerah tentang pemberdaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan UMKM secara berkelanjutan. Dengan adanya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM adalah untuk meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan wirausaha baru. Provinsi Jambi saat ini memiliki dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, perekonomian Jambi diperkirakan masih dapat tumbuh 3,71% hingga 4,11% year of year, didukung oleh kinerja sektor pertambangan yang masih cukup baik. Seiring dengan menurunnya hampir seluruh sektor utama ekonomi Jambi akibat wabah virus corona, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi di tahun 2020 mengalami tekanan, dan diperkirakan tumbuh di sekitar angka proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yakni sebesar 2,3% year of year . Selain itu, tingkat penjualan UMKM pada triwulan satu tahun 2020 menurun, dan diperkirakan lebih buruk pada triwulan dua tahun 2020. Di sisi lain UMKM juga menghadapi tantangan kenaikan harga bahan baku. Menanggapi hal ini, upaya pemerintah kini menyelenggarakan pasar murah bersubsidi dengan target pedagang, pengrajin, serta masyarakat non program keluarga harapan, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi (adminsij, 2020). Berikut merupakan tabel jumlah UMKM yang terkena dampak Covid-19 yang ada di Provinsi Jambi 2020.

<b>No.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>UMKM</b>
1	Tanjung Jabung Timur	1.165
2	Kota Jambi	3.798
3	Kota Sungai Penuh	1.720
4	Tanjung Jabung Barat	1.907
5	Bungo	1.136
6	Sarolangun	957
7	Batanghari	1.367
8	Merangin	1.021
9	Tebo	1.846
10	Kerinci	1.827
11	Muaro Jambi	1.364

Sumber: *Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Prov. Jambi 2020.*

Dengan adanya peraturan daerah Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Maka di tetapkan langsung didalam peraturan daerah tersebut tugas dan fungsi pemerintah daerah salah satunya adalah untuk melakukan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang meliputi pertumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan usaha. Oleh karena itu setiap Pemerintah Daerah yang berada di Provinsi Jambi memiliki peran dan fungsi dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Salah satu daerah tersebut ialah Kabupten Tebo. Berkaitan dengan kondisi saat ini dimana setiap daerah mengalami masalah global yang masih menjadi tugas pemerintah dalam menanganinya agar segera membaik. Permasalahan global tersebut ialah masuknya Covid-19 ke Indonesia. Kondisi ekonomi disetiap daerah akibat pandemi covid-19 ini mengalami penurunan stabilitasnya, oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya dalam melakukan upaya pemulihan terhitung pandemi yang sudah cukup lama menjadi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Tahun 2021 ini, kondisi terbaru dari masalah covid-19 sudah mulai mereda dengan adanya program pemerintah yaitu

vaksinasi. Berhubungan dengan hal tersebut sektor ekonomi juga perlu adanya pemulihan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh setiap daerah.

Kabupaten Tebo ini menjadi salah satu daerah Provinsi Jambi yang mengalami dampak penurunan ekonomi akibat dari pandemi covid-19. Untuk menangani persoalan tersebut maka perlu adanya suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan yang ada pada sektor perekonomian. Salah satu sektor perekonomian yang sangat terdampak ialah pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui Peraturan Bupati Tebo Nomor 38 Tahun 2020 tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten Tebo tahun 2020 salah satunya dialihkan untuk menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, PEN untuk merespon penurunan aktivitas masyarakat, khususnya di sektor informal atau UMKM. Untuk memulihkan sektor UMKM di Kabupaten Tebo pemerintah daerahnya perlu melakukan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh guna mendukung program pemulihan ekonomi.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Dalam pemulihan ekonomi nasional terutama program yang di berikan oleh Gubernur Jambi yang kemudian di salurkan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro kecil, dan menengah lewat kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula. Dengan bergabungnya para pelaku UMKM kedalam platform digital diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk sehingga produk dapat di

kenal. UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional bagi usaha mikro, kecil dan menengah (Admin, 2021). Untuk memulihkan perekonomian masyarakat pada pandemi Covid-19 adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas lapangan usaha masyarakat dan pendapatan petani diimplimentasikan melalui program perencanaan dan pembangunan industri, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, program Pengembangan UMKM, program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (Informatika, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif dimiliki oleh metode penelitian kualitatif, meskipun prosesnya sama namun prosedur kualitatif tetap mengandalkan data yang berupa teks dan gambar, memiliki cara-cara unik dalam analisis datanya, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda Creswell (2016). Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif untuk mengetahui bagaimana menentukan, mencari dan mengelola sumber-sumber data yang diperlukan mengenai peran pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM Pada Masa Covid-19 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Satuan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai subjek dari penelitian. Unit analisis pula dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada kaitannya dengan komponen atau fokus yang sedang diteliti (Arikunto, 2010:124) Berdasarkan pengertian tersebut bahwa unit analisis dapat berupa subjek dari penelitian atau fokus yang berkaitan dengan komponen yang akan atau sedang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan terdiri dari: Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tebo ialah sebagai penanggung jawab dan sebagai ketua UMKM terkait penyelenggaraan yang berhubungan dengan Usha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tebo. Perwakilan pelaku UMKM di Kabupaten Tebo ialah sebagai pihak yang secara langsung peneliti melakukan penelitian melalui wawancara untuk memperoleh informasi dan data mengenai

bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tebo.

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2015:244). Maka dalam penelitian ini peneliti melakukan proses analisis data yang dapat diuraikan yaitu; peneliti merangkum data yang didapatkan dan kemudian memilih serta menyusun data-data yang diperoleh secara sistematis dalam memilih hal-hal yang pokok dan fokus dalam mencari tema serta polanya untuk memberikan gambaran yang jelas bagi peneliti mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Tebo, dalam tahap kedua ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat dan bagan sehingga mempermudah peneliti untuk memahami dan merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan selanjutnya, dalam tahap terakhir ini kemudian peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan penemuan baru yang berupa sebuah deskripsi ataupun gambaran dari Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

## **PEMBAHASAN**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tebo dalam dua tahun terakhir ini tak menunjukkan perkembangan yang positif. Melihat redupnya usaha UMKM di Tebo, Pemerintah Kabupaten setempat bakal memfasilitasi bahkan akan memberikan pendampingan agar UMKM bisa lebih maju dan terarah. (Redaktur, 2019). Pemerintah Kabupaten setempat bakal memfasilitasi bahkan akan memberikan pendampingan agar UMKM bisa lebih maju dan terarah. Dengan hal ini Bupati Tebo memastikan Pemerintah Kabupaten Tebo akan konsen dan serius memberi pendampingan dan memfasilitasi UMKM yang diharapkan mampu menompang perekonomian warga. Berikut data UMKM Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi.

No.	Kecamatan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi	Jumlah UMKM
1.	VII Koto Ilir	310
2.	VII Koto	271
3.	Tebo Ulu	81
4.	Tebo Tengah	2.804
5	Tebo Ilir	222
6	Serai Serumpun	201
7	Rimbo Ulu	370
8	Rimbo Ilir	686
9	Rimbo Bujang	1.782
10	Muar Tabir	164
11	Tengah Ilir	70
12	Sumay	43
Jumlah		7.004

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Tebo, 2021.

Peneliti akan membahas pada peran pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dengan hal ini, untuk mendalami penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, peneliti menggunakan teori Achmad (2022) bahwa dalam pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan 3 elemen diantaranya sebagai berikut.

### **Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi**

#### **1) Pemerintah sebagai regulator**

Merupakan menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan, terdiri dari:



a. kebijakan yang dibuat dalam upaya pemberdayaan UMKM

Kebijakan yang dibuat dalam upaya pemberdayaan UMKM memang sangat membantu, terlebih lagi dengan memberikan pelatihan secara online, dan memberikan bantuan alat serta bantuan modal, memberikan harapan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produk di pasar online maupun offline. Hal ini dilakukan sebagai salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi stabilitas ekonomi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Namun pada kenyataannya dalam peran pemerintah daerah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi masih belum maksimal, dikarenakan dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat pada upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten ini belum dilakukan secara merata dan kesiapan dari pelaku UMKM menghadapi masa pandemi Covid-19 dalam melakukan kegiatan berjualan secara online belum terbiasa dan offline menyesuaikan keadaan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Tebo terutama Bidang Koperasi dan UMKM Kabupaten Tebo. Kebijakan yang dibuat dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tebo ini, bahwa dalam melakukan sebuah kebijakan atau menggerakkan UMKM dilakukan pelatihan secara online, pemberian bantuan alat dan pemberian modal. Akan tetapi dalam melakukan kebijakan tersebut ada beberapa dari UMKM di Kabupaten Tebo ini hanya berupa himbauan saja seperti jangan berinteraksi secara langsung. Dengan hal ini, dalam kebijakan yang dibuat Kabupaten Tebo dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ini masih belum merata dan belum maksimal, namun Pemerintah Kabupaten Tebo terus berupaya dalam mengatasi Covid-19 terutama dalam pemberdayaan di Kabupaten Tebo.

b. program yang dibuat dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid- 19

Dalam program yang dibuat dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 ini dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam setiap program pengembangan usahanya terutama dalam pemberdayaan UMKM. Pada setiap kebijakan yang mendukung dalam program yang dibuat dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi terutama pada masa Covid-19 ini dianggarkan lewat APBN/ APBD,

melalui kebijakan yang ada di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan hal ini, maka pemerintah memberikan acuan dasar kepada para pelaku UMKM pada setiap melaksanakan kegiatan dalam melakukan pemberdayaan UMKM yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Program yang dibuat dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 pemerintah Kabupaten Tebo lebih menfokuskan melakukan pendataan dan pemberdayaan. Dalam melakukan program pendataan dilakukan untuk mewujudkan sebuah legalitas kepada para pelaku UMKM sehingga dalam memproduksi barang dapat dilindungi secara hukum. Pada program pendataan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tebo melakukan pendataan secara birokrasi, baik dari pendataan desa ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan serta kecamatan sampai Kabupaten.

## **2) Pemerintah sebagai dinamisator**

Merupakan menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah, terdiri dari:

### **a. bimbingan untuk mendorong partisipasi pelaku UMKM**

Peran pemerintah dalam bentuk bimbingan untuk mendorong partisipasi pelaku UMKM adalah dengan dilakukan pendataan terlebih dahulu yang selanjutnya dapat diketahui perkembangan dari para pelaku beserta legalitasnya. Dengan adanya pelaksanaan dan mendukung pengembangan usaha dalam pemberdayaan UMKM, maka dapat diberikan pengembangan usaha pada UMKM dengan pelaksanaannya menggunakan pelatihan atau pembinaan secara online, pemberian alat dan modal sehingga menciptakan UMKM naik kelas. Hal ini, menjadi salah satu cara dalam mendorong partisipasi pelaku UMKM dalam pembinaan produk dari pelatihan secara online terhadap pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Maka dari itu, dengan mendorong bentuk partisipasi para pelaku

UMKM atau usaha mikro pada masa Covid-19 ini dengan mempermudah penerbitan legalitas produk usaha sehingga diharapkan mampu memperbaiki produk UMKM di Kabupaten Tebo. Hal ini menjadikan sebuah kompetensi yang menjadikan sebuah daya tarik bagi UMKM di Kabupaten Tebo baik untuk memperbaiki maupun menjadikan UMKM naik kelas. Dengan hal ini, untuk menjadikan program yang sifatnya menjurus kepada marketplace atau goal digital dengan memiliki kemasan menarik di pasar serta dilengkapi legalitas produknya. Namun pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, bentuk bantuan secara finansial baik dari alat maupun modal masih belum merata. Memang dalam bentuk partisipasi hanya beberapa saja yang mendapatkan pelatihan selebihnya adalah hanya diberikan himbauan atau mengikuti anjuran dari pemerintah dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan dan berjaga jarak. Pelaku usaha UMKM yang tidak ada tindakan secara langsung dengan hanya berupa himbauan dan dukungan saja pada masa Covid-19 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Namun dalam pengembangan yang dilakukan untuk mendorong partisipasi pelaku tentunya terlebih dahulu melakukan protokol kesehatan agar menghindari Covid-19, kemudian diberikan pelatihan untuk sebuah cara pemasaran secara online kepada konsumen dan pembinaan dalam membuat kemasan yang menarik tentunya dilengkapi legalitas hukum untuk menjadikan UMKM naik kelas yang menjurus goal digital di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

**b. pengarahan dalam proses pemberdayaan**

Pengarahan dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah dengan melakukan pendataan, dokumentasi serta ditindaklanjuti kepada pemasaran produk yang dilengkapi oleh legalitas. Dengan hal ini, peran pemerintah daerah dalam memelihara dan mendorong pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tebo pada masa Covid-19 bahwa pemerintah memberikan bantuan, himbauan serta melakukan dukungan usaha dengan pemasaran baik secara online

maupun offline. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang diberikan untuk mematuhi protokol kesehatan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Tebo. pada pengarahannya dalam proses pemberdayaan pada masa Covid-19 ini, pemerintah daerah Kabupaten Tebo melakukan pelatihan secara online dalam sebulan sekali. Dengan harapan pelaku UMKM yang produktif dalam pemasarannya bisa menjangkau ke berbagai daerah dan bisa lebih berkembang lagi. Dengan adanya pelatihan secara online menjadi sebuah perhatian dari pemerintah daerah terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Namun dalam pelaksanaannya kurang begitu maksimal karena kurang begitu diperhatikan baik dari pemberian modal ataupun penyuluhan, salah satunya terjadi dari pelaku UMKM produksi Tempe.

### **3) Pemerintah sebagai fasilitator**

menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan seperti menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah, terdiri dari:

#### **a. penyediaan sarana dan prasarana**

Persiapan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi dalam pemulihan perekonomian pada masa Covid-19 dengan melaksanakan koordinasi disetiap organisasi perangkat daerah maupun organisasi terkait. Dengan hal ini, untuk memberdayakan UMKM itu sendiri terutama di Kabupaten Tebo dengan mengarahkan kepada para pelaku UMKM dengan membentuk koperasi sehingga mempunyai badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Maka UMKM dapat diarahkan sebagai koperasi melalui pemerintah, sehingga mampu memberdayakan anggota dan manajemen yang baik melalui kepengurusan di dalam koperasi. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sebuah program dengan yang dinamakan program UMKM digital. Tujuannya dibentuk program ini agar dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dengan para pelaku UMKM dengan dilakukannya pelatihan secara online, diberikannya sebuah wawasan seperti mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya UMKM digital ini diharapkan dapat

berupaya untuk memulihkan perekonomian. Namun dalam melakukan kegiatan tersebut sebagian UMKM di Kabupaten Tebo ini, ada yang tidak pernah mendapatkan pelatihan secara online. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM di Kabupaten Tebo hanya sebatas individu dan paling tinggi adalah kelompok. Maka dari itu UMKM diarahkan sebagai koperasi dengan beberapa anggota UMKM yang sudah mendirikan satu koperasi melalui pemerintah sehingga mampu memberdayakan anggota dan manajemen yang baik, juga koordinasi melalui kepengurusan di dalam koperasi.

b. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tebo bahwa dalam upaya memulihkan perekonomian diberikannya bentuk pelatihan, pemberian alat dan pemberian modal. Selain itu, terdapat himbauan, memberikan sosialisasi dan memfasilitasi dengan memberikan bantuan yang mengacu kepada protokol kesehatan dan melakukan pelatihan pengemasan produk yang menarik. Namun untuk mendukung pemulihan perekonomian terutama dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tebo masih belum merata, akan tetapi ada beberapa bantuan. Dalam hal ini tidak semua dapat dan tidak menyeluruh hanya sebagian saja yang menerima bantuan baik dari pelatihan, memberikan bantuan maupun bantuan secara finansial.

c. kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dalam pemberdayaan UMKM

Mengembangkan UMKM pada masa Covid-19 adalah perlu didukungnya dana yang memadai guna untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dilihat dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi yang memiliki keterbatasan dan mengakui kurang memadai dalam anggaran maupun dari segi sumber daya manusia yang berkualitas. Namun peran dari pemerintah daerah dalam upaya yang dilakukan sudah memaksimalkan untuk kebutuhan para pelaku UMKM di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi pada masa Covid-19 dengan dilaksanakannya sebuah pelatihan. Anggaran yang tersedia juga akan berpengaruh pada sumberdaya manusia, maka dari itu untuk

melakukan sebuah kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi membutuhkan anggaran dana besar. Hal ini disebabkan dengan banyaknya jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Tebo sehingga tidak merata dalam melakukan pelatihannya. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dalam pemberdayaan UMKM dengan melakukan sebuah strategi yang dilakukan dengan pemasaran secara online seperti memberikan pelatihan dan himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang bisa penulis tarik berdasarkan hasil mengumpulkan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian menganalisis data sesuai dengan aktivitas yang telah ditentukan serta menguji keabsahan data yang peneliti paparkan, maka secara keseluruhan dalam penelitian mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pemberdayaan UMKM Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi yakni; pertama, kebijakan yang dibuat dalam upaya pemberdayaan UMKM, memberikan sebuah himbauan dan tetap menggerakkan para pelaku UMKM dan memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM secara online, memberikan bantuan alat modal dan bantuan alat. Namun dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tebo pelaksanaannya masih belum maksimal dan tidak merata. Kemudian pada program yang dibuat dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 adalah bahwa dalam program yang dibuat dalam pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 lebih memfokuskan kepada pendataan dan pemberdayaan. Pada kebijakan yang dibuat dalam upaya pemberdayaan UMKM pada penataan tersebut diharapkan mampu mewujudkan legalitas dalam memproduksi barang sehingga dapat dilindungi oleh hukum dan pada pemberdayaan dilakukan pelatihan secara online, pemberian alat bantu dan modal. Kedua, dalam bimbingan untuk mendorong partisipasi pelaku UMKM adalah dengan mempermudah penerbitan secara legalitas terhadap produk usaha mikro, dilakukan pendataan terlebih dahulu agar pihak dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tebo dapat mengetahui

perkembangan para pelaku UMKM yang dilengkapi dengan legalitas produk akan tetapi pada pelaksanaannya belum dikatakan secara merata baik dari alat maupun modal. Pada pengarahannya dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah dengan melakukan pendataan, dokumentasi serta ditindaklanjuti kepada pemasaran produk yang dilengkapi oleh legalitas. Namun dalam pelaksanaannya kurang begitu maksimal karena kurang begitu diperhatikan baik dari pemberian modal ataupun penyuluhan salah satunya pada UMKM produksi Tempe. Dan ketiga, penyediaan sarana dan prasarana dengan melaksanakan koordinasi disetiap organisasi perangkat daerah kepada para pelaku UMKM membentuk koperasi agar mempunyai badan hukum yang diakui oleh pemerintah. Pada pemberdayaan UMKM pada masa Covid-19 terdapat pelatihan, pemberian alat dan pemberian modal. Pada kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dalam pemberdayaan UMKM memiliki keterbatasan dan kurang memadai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Admin, 2021. Dinas Koperasi, Kecil dan Menengah. [Online] Available at: <https://diskopukm.jambiprov.go.id/berita/detail/33/PENYERAHAN-BANTUAN-PEN-BAGI-UMKM-BUNGO-DAN-TEBO> [Accessed 12 11 2023].
- Achmad, W. W., (2022). Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas. Pertama ed. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).
- Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. (2013). Research Design (Pendekatan Kualitatif, dan Mixed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Informatika, D. K. d., 2020. Wabup Syahlan : Pemulihan Ekonomi Nasional Bagi UMKM Di Kabupaten Tebo. [Online] Available at: <https://tebokab.go.id/news/wabup-syahlan-pemulihan-ekonomi-nasional-bagi-umkm-di-kabupaten-tebo.html> [Accessed 12 11 2023].
- News 2020. Pemprov Jambi Prioritaskan Pembinaan UMKM ke Jenjang Lebih Tinggi. [Online]

Available at: <https://www.antaranews.com/berita/934192/pemprov-jambiprioritaskanpembinaan-umkm-ke-jenjang-lebih-tinggi>. [Accessed 25 02 2020]

Purba, G. M., 2019. Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan Umkm. Ilmu Politik dan Pemerintahan, p. 5.

Piyana, E. D., Triana, L. & Sari, R., 2023. Strategi Pengembangan UMKM Produk Lokal Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Jurnal Pertanian Agros, 25(2), pp. 1522 - 1530.

Redaktur, 2019. UMKM di Tebo Tak Berkembang, Sukandar: Butuh Peran Aktif Masyarakat. [Online] Available at: <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13527553/UMKM-di-Tebo-Tak-Berkembang-Sukandar-Butuh-Peran-Aktif-Masyarakat> [Accessed 12 11 2023].

Reza, K., Oemar, K. & T., 2017. Sejarah Pemekaran Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (1999-2015). Jurnal Online Mahasiswa, pp. 1-12.

Sobarna, A., 2003. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin Perkotaan. Jurnal Mimbar, Vol.19 No.3.

Siregara, W., Nurlinda, I. & Priyanta, M., 2021. Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pelanggaran Administrasi Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan Sempadan Sungai Dalam Rangka Terwujudnya Tata Ruang Yang Berkelanjutan. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, pp. 130-149.

Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Tumija, 2022. Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Masa Pandemi Covid-19 di Cipageran, Cimahi. Civitas Consecratio, II (1), p. 27.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan



Menengah.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

Peraturan Bupati Tebo Nomor 109 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja  
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2021